

Orientasi Kognitif dan Harapan Perempuan Etnis Tionghoa Kota Padang terhadap Kebijakan Pasca Orde Baru

Oleh: Estika Sari

ABSTRACT

Political issue of New Order era has caused a "trauma" for certain groups such as women, especially Chinese women who in fact are lagging far away from political life. This article seeks to describe the political orientation of Chinese ethnic, especially on cognitive orientations and expectations towards the political issues after new order era. The finding of this study showed that cognitive orientation of Chinese women are still superficial and far from the expectation. The hope toward the current politic is that they could be more involved in any political empowerment.

Kata Kunci: *Orientasi Kognitif, perempuan etnis Tionghoa, kebijakan pasca Orde Baru*

I. PENDAHULUAN

Transisi menuju demokrasi di Indonesia akhirnya meniupkan angin segar dan sekaligus membuka peluang bagi aktifis perempuan untuk memperjuangkan keadilan gender dalam bidang politik. Selama ini di belahan dunia mana pun, baik di negara-negara demokrasi yang mapan maupun di negara-negara yang baru belajar demokrasi, perempuan selalu menjadi warga negara kelas dua. Contohnya dalam hal keterlibatan di dunia politik. Fakta mengungkapkan bahwa di lembaga legislatif perempuan tidak terwakili secara proporsional. Pemilu pada masa Orde Baru yang terselenggara sebanyak delapan kali, perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%. Sementara itu di era reformasi, pemilu 1999 keterwakilan perempuan di

legislatif merosot menjadi 9%, sedangkan pemilu 2004 perempuan hanya terwakili sekitar 11%. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Pasca dieliminirnya ketentuan kuota 30%, keterwakilan perempuan dalam pemilu 2009 di lembaga legislatif melonjak menjadi 17,7%. Walaupun mengalami kenaikan sekitar 7% dari pemilu sebelumnya, namun masih menggambarkan termarginalnya perempuan dalam kehidupan politik.

Termarginalnya perempuan dalam bidang politik, jika dicari akar permasalahannya dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor inheren yang melekat pada diri perempuan itu sendiri dan faktor di luar diri perempuan tersebut. Salah satu faktor di luar diri perempuan yang

sangat berpengaruh dalam menenukan keterwakilan perempuan dalam politik adalah faktor struktur dan sistem politik dimana perempuan tersebut berinteraksi dengan dunia politik. Dengan kata lain intensitas keterlibatan perempuan dalam politik sangat diwarnai oleh model kepolitikan suatu negara dalam suatu masa (waktu).

Di masa Orde Baru, perempuan didomestikasi secara politis yaitu mempolitikasi perempuan, menerapkan ideologi patriarkhi, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan. Realitas ini telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo. Uhlin¹ mengungkapkan struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru itu dapat ditemui dalam kebijakan-kebijakan sebagai output dari sistem politik, bersemayamnya ideologi patriarkhi dan menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik bagi partai pemerintah terutama menjelang pemilu.

Khusus untuk kaum perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa, kondisinya diperparah lagi oleh rezim Orde Baru dengan melakukan politik diskriminasi,

sehingga kebebasan politik warga keturunan etnis Tionghoa pun terbelenggu². Dengan demikian perempuan etnis Tionghoa mengalami *double discrimination* (diskriminasi ganda). Dengan kata lain perempuan etnis Tionghoa mengalami marginalisasi yang berlapis, yaitu : *Pertama*, mereka termarginalisasi dalam kehidupan politik karena mereka perempuan. *Kedua*, termarginalisasi dalam kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas. Bahkan menurut Saputra³ masih ada satu diskriminasi lagi (menjadi *triple discrimination*) khususnya buat kalangan etnis Tionghoa di kota-kota besar, termasuk perempuan di dalamnya bahwa mereka sering menjadi target (seringkali direkayasa atau kambing hitam) kerusuhan massa ataupun tindak kekerasan.

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan terhadap aktifitas politik perempuan termasuk perempuan etnis Tionghoa. Terlebih dengan pembaharuan-pembaharuan kebijakan yang dilakukan Gus Dur sebagai presiden terpilih awal pasca Orde Baru, yaitu mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pengekangan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai dan kisah-kisah bernuansa Tionghoa, serta menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional, semakin memberi ruang bagi etnis Tionghoa untuk

¹ Uhlin. 1997. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Rofik Suhud. Bandung: Mizan.

²Hendrik, Doni. 2003. "Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu 1999 di Kota Padang". *Skripsi-FISIP Universitas Andalas*.

³Saputra, Dianthus. 2001. "Marginalisasi Perempuan Cina (Tionghoa) di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan No.17*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang kehidupan termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu menarik untuk diteliti: *Bagaimanakah orientasi kognitif dan harapan perempuan etnis Tionghoa Kota Padang terhadap kepolitikan pasca Orde Baru?*

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Orientasi Politik Ditinjau dari Orientasi Kognitif.

Orientasi politik warga negara terhadap sistem politik terdiri dari tiga macam. *Pertama*, orientasi *cognitive* yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap sistem politik, peran dan pejabat yang menjalankan peran itu dalam sistem politik, termasuk proses input dan output dari sistem politik. *Kedua*, orientasi *affective* atau perasaan terhadap sistem politik tersebut dan *performance* sistem politik itu. *Ketiga*, orientasi *evaluative* yaitu memberikan penilaian dan opini tentang obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar-standar nilai dan kriteria yang berkenaan dengan informasi dan perasaan. Senada dengan pendapat ini pada bagian lain *Almond* dan *Powell*⁴ juga mengungkapkan tiga orientasi individu terhadap politik, hanya saja perbedaannya mereka memasukkan aspek perasaan senang atau tidak senang (*favourable* atau *unfavourable*) terhadap obyek-obyek politik atau sistem politik secara keseluruhan.

⁴ Almond, Gabriel dan G.B. Powell Jr. 1978. *Comparative Politics: A Development Approach*. New Delhi : Oxford and IBH Publishing Co.

Obyek politik yang disoroti oleh ketiga ahli tersebut adalah : *Pertama*, peranan atau struktur khusus dalam sistem politik seperti badan legislatif, eksekutif ataupun birokrasi. *Kedua*, pemegang jabatan seperti pemimpin partai, legislator dan administrator. *Ketiga*, kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan dalam bentuk proses pembuatan dan penerapan keputusan tersebut. Sedangkan menurut *Muller* (1977) sebagaimana dikutip *Ratnawati*⁵ obyek politik yang harus dicermati adalah parlemen, pemerintahan nasional, penegak hukum, lembaga peradilan yang bebas dan aktor atau kepemimpinan dari elit politik.

Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap obyek-obyek politik tersebut akan menggambarkan bagaimana orientasi kognitifnya terhadap suatu model kepolitikan. Selanjutnya orientasi kognitif warga negara terhadap obyek politik secara operasional dapat dicermati pandangan warga negara terhadap sistem politik yang ada dengan membandingkan nilai-nilai politik yang dijalankan oleh sistem apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai politik ideal yang dianut oleh individu. Nilai-nilai politik ideal yang dianut individu sangat ditentukan oleh seberapa jauh individu tersebut terlibat dalam proses sosialisasi politik.

Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan

⁵ Ratnawati. 1993. *Sikap Perilaku dan Sistem Politik*. Laporan Penelitian UGM Yogyakarta

keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya⁶. Semakin tersosialisasi individu/warga negara terhadap politik maka semakin kapabel ia melakukan opini terhadap obyek politik atau pun keseluruhan sistem politik yang diamati. Implikasi dari hal ini adalah warga negara mampu pula memberikan opininya atau harapan-harapannya terhadap suatu sistem politik di masa depan dengan belajar pada suasana politik masa lalu.

Orientasi politik sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat ditentukan oleh bekerjanya suatu sistem politik. Suasana bekerjanya sistem politik dalam suatu rezim disebut dengan kepolitikan. Affan Gaffar⁷ lebih jauh merinci beberapa indikator yang menggambarkan tidak demokratisnya kepolitikan Orde Baru. *Pertama*, kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia. Lembaga tersebut merupakan pembentuk dan penentu agenda sosial, ekonomi dan politik nasional. *Kedua*, rotasi kekuasaan hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa. Selama pemerintahan Orde Baru rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jabatan wakil presiden akan tetapi pemerintahan secara esensial

masih tetap sama. *Ketiga*, rekrutmen politik tertutup. *Political recruitment* merupakan proses pengisian jabatan politik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam negara yang demokratik, untuk mengisi jabatan politik tersebut semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama. Akan tetapi pada kepolitikan Orde Baru rekrutmen bersifat tertutup dan segala sesuatunya dikontrol dengan ketat oleh lembaga kepresidenan. *Keempat*, penyelenggaraan pemilu yang jauh dari demokratis. Pemilu di Indonesia sejak tahun 1977 dibuat sedemikian rupa agar Golkar dapat memenangkan pemilu dengan mayoritas mutlak, sehingga kemudian Golkar menjadi satu partai hegemonik. *Kelima*, masyarakat belum sepenuhnya menikmati hak-hak dasarnya seperti kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan yang lainnya⁸.

Pasca Orde Baru yang ditandai oleh pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden tanggal 21 Mei 1998 merupakan *entry point* bagi demokratisasi di Indonesia. Berbagai langkah reformasi politik dilakukan mulai dari struktur, kultur, proses maupun dari segi produk politik. Reformasi struktur politik adalah mereformasi struktur politik yang ada di dalam sistem politik agar dapat berfungsi secara baik dan benar. Struktur-struktur politik yang umumnya dimiliki oleh sistem politik adalah partai politik dan kelompok

⁶ Almond. 1978. *Op cit.*; Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews (ed.). 1989. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁷ Affan Gaffar. 1996. *Sebuah Catatan Untuk Wanita Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis UGM di Yogyakarta, 12 Desember 1996.

⁸ Affan Gaffar. 1992. *The Javanese Voters: A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

kepentingan, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan peradilan⁹.

Reformasi dalam aspek kultur politik adalah mereformasi budaya politik dari budaya politik yang dikembangkan dan didasarkan kepada nilai-nilai tradisi kekeluargaan yang mengutamakan penggunaan emosi di dalam penentuan sikap dan tingkah laku politik (seperti yang dikenal dengan istilah paternalistik atau pun patron-klien, juga tradisi budaya politik yang tertutup, sentralistik, manipulatif dan sebagainya) menuju budaya politik yang demokratis, mengarah kepada keterbukaan, kejujuran, persamaan dan keadilan. Budaya politik yang demokratis menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi¹⁰. Selanjutnya budaya politik yang demokratis akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil.

Dalam konteks reformasi proses politik diperlukan upaya untuk memungkinkan terwujudnya mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara. Artinya tidak ada lagi pemusatan kekuasaan oleh eksekutif dalam seluruh pelaksanaan proses politik. Apabila kekuasaan eksekutif terlampaui dominan tanpa diimbangi oleh kuatnya fungsi legislatif maka akuntabilitas sebagai hal yang sentral

dalam demokrasi tidak berjalan. Di lain pihak, apabila badan yudikatif tidak berfungsi secara benar akibat dominasi eksekutif dan lemahnya legislatif akan berimplikasi pada lemahnya aspek kontrol dan penegakan hukum. Proses politik yang demikian pada akhirnya akan menghasilkan produk-produk kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Reformasi dalam hal produk politik sangat berkaitan dengan tiga aspek yang telah dibicarakan sebelumnya. Hal ini disebabkan produk politik berupa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sangat tergantung dari proses politik yang sedang berlangsung. Proses politik ditentukan oleh berjalannya secara baik fungsi-fungsi dari struktur-struktur di dalam sistem politik. Apabila setiap struktur tersebut dapat berfungsi secara benar dan ditunjang oleh kultur politik yang demokratis pada akhirnya akan menghasilkan produk-produk kebijakan yang memenuhi sebanyak mungkin nilai dan kepentingan warga masyarakat.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini *orientasi kognitif* meliputi pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu sistem politik pada umumnya, yang meliputi pemahamannya terhadap peranan struktur, fungsi dan rekrutmen lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam supra struktur politik, yang meliputi lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD Presiden (eksekutif), MA (yudikatif), dan BPK) serta berbagai lembaga yang terbentuk seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Selain itu

⁹ Almond. 1978. *Op cit*

¹⁰ Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta : Bina Aksara.

juga lembaga-lembaga yang berada dalam tataran infra struktur politik seperti peranan partai politik, fungsi partai politik dalam masyarakat dan adanya organisasi-organisasi kepentingan lainnya. Juga dicermati pengetahuan seputar pemilu dan pengetahuan warga negara akan hak dan kewajiban bernegara dan bermasyarakat, dan pengetahuan seputar kepolitikan pasca Orde Baru, baik menyangkut bekerjanya sistem kepolitikan pasca Orde Baru secara umum yang dilihat melalui: (1) lembaga-lembaga pemerintahan, parlemen, lembaga peradilan; (2) kebijakan atau keputusan yang dihasilkan sebagai output dalam kepolitikan; (3) dari segi aktor atau kepemimpinan dari elit politik.

Selanjutnya harapan-harapan perempuan etnis Tionghoa terhadap sistem politik pasca Orde Baru meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) harapan terhadap upaya peningkatan partisipasi politik perempuan etnis Tionghoa; (2) harapan terhadap pelaksanaan pemilu 2009 yang akan datang; dan (3) harapan terhadap pelayanan birokrasi.

Perempuan Etnis Tionghoa dalam Kehidupan Politik di Indonesia.

Membicarakan keterlibatan perempuan Etnis Tionghoa dalam kehidupan politik di Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari kajian seputar keterlibatan perempuan Indonesia secara umum dalam bidang politik. Uniknyanya adalah bahwa keterlibatan perempuan etnis Tionghoa di Indonesia mengalami marjinalisasi yang berlapis atau *double* bahkan *triple discrimination*. Pertama, mereka termarjinalisasi

dalam kehidupan politik dikarenakan mereka perempuan. Kedua, mereka termarjinalisasi di kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas yang seringkali menjadi 'sasaran' bagi penguasa dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang akut. Dikatakan etnis minoritas karena jumlah populasi etnis Tionghoa di Indonesia hanya sekitar 5 juta orang (kurang dari 3%) dari total populasi seluruh Indonesia yang berjumlah 202 juta orang¹¹.

Secara historis politik diskriminasi ini sebenarnya warisan dari penjajah Belanda yang membagi warga negara menjadi tiga, sebagaimana termuat dalam *Reegerings Reglement jo Indische Staatregeling dan Nederlandsche Oederdaan Schap van Niet Nederlands*. Warga negara kelas pertama disebut *privileg* yaitu orang-orang keturunan Eropa. Sementara warga negara kelas dua ialah bangsa Timur Jauh yang didalamnya terdapat etnis Tionghoa dan Arab. Sedangkan warga negara kelas tiga adalah Boemi Poetra. Pada masa Orde Lama dikeluarkan pula politik diskriminatif dengan Peraturan No.10 tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah swatantra I dan II (daerah tingkat I dan II). Rezim Orde Baru mengeluarkan Keppres No.52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk, dengan mewajibkan keturunan etnis Tionghoa mengisi model K-1. Hal ini kemudian diperkuat oleh SKBRI Peraturan Menteri Kehakiman No.

¹¹Freedman, Amy L. 2000. *Political Participation and Ethnic Minorities: Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and United States*. London: Routledge.

JB3/4/12 tahun 1978¹². Peraturan-peraturan diskriminatif ini tentu mempengaruhi proses kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik.

Secara umum partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia dibagi dalam dua bentuk. Pertama, secara formal melalui partai politik berasimilasi dimana masyarakat etnis Tionghoa (baik perempuan atau laki-laki) yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui partai politik pribumi. Sebagai contoh pada masa Orde Baru berintegrasi dengan Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para tokoh terkenal dari etnis Tionghoa antara lain Yusuf Wanandi (nama asli Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Khoen) dan Djoko Sudyatmiko (Lie Giok Hauw). Kedua, bentuk partisipasi informal mencakup aktivitas organisasi-organisasi non politik dan kelompok-kelompok penekan. Sebut saja contohnya Badan Komunikasi (Bakom) yang dibentuk Pemerintah Orde Baru tahun 1977 yang berfungsi sebagai badan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Contoh lain organisasi Prasetya Mulya yang didirikan tahun 1980 merupakan sebuah yayasan yang berkepentingan membantu pemerintah melaksanakan program-program sosial. Eksistensi kelompok-kelompok penekan dari etnis Tionghoa ini tidak terlalu menonjol. Dalam konteks ini terdapat pandangan bahwa ketidakaktifan etnis Tionghoa dalam bidang politik merupakan

strategi mereka mempertahankan posisi di sektor ekonomi. Disamping itu juga ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak aktifnya etnis ini di bidang politik sebagai implikasi dari kebijakan penguasa yang menyumbat sumber-sumber politik formal. Tujuannya adalah untuk membangun ketergantungan mereka kepada kekuasaan politik¹³.

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan bagi etnis minoritas ini untuk berkiprah dalam bidang politik. Satu langkah kongkrit yang ditempuh pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut penekalan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai, yang kembali hadir di tengah-tengah perayaan imlek dan kisah-kisah bernuansa Tionghoa pun bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu.

I II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan *mixing method*, yaitu memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memetakan kecenderungan jawaban responden.

Responden penelitian ini adalah perempuan etnis Tionghoa di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Jumlah responden penelitian ditetapkan

¹² Hendrik, Doni. 2003. *Op cit*.

¹³ Saputra, Dianthus. 2001. *Op cit*.

dengan menggunakan formula Frank Lych berikut :

$$n = \frac{NZ^2 p (1 - p)}{Nd^2 + Z (1 - p)}$$

dimana: n= jumlah sampel/responden

N= jumlah populasi

Z= nilai variabel normal
(1,96) untuk tingkat
kepercayaan 95%.

p= harga patokan tertinggi
(0,50).

d= sampling error (0,10)

Dengan penggunaan rumus di atas, maka diperoleh sampel sejumlah 87 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan wawancara mendalam (*depth interview*). Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi melalui pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.

Selanjutnya data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kualitatif melalui analisis isi. Kongkritnya ada dua cara yang digunakan dalam mengembangkan analisis. *Pertama*, untuk mendeskripsikan orientasi kognitif responden digunakan teknik analisis isi dengan cara mengembangkan kategori bertingkat yaitu *sangat paham, agak paham, kurang paham, dan tidak paham sama sekali*. Sangat paham (SP) dicirikan dengan kemampuan responden untuk mendefinisikan, membedakan, mendeskripsikan dengan tepat pengetahuan dan pemahaman tentang suasana kepolitikan pasca Orde Baru yang ditanyakan. Agak paham (AP) ditandai dengan kemampuan responden mendefinisikan, membedakan,

dan mendeskripsikan yang kurang tepat tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap kepolitikan pasca Orde Baru. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang kepolitikan pasca Orde Baru yang sebagian-sebagian dikategorikan ke dalam kurang paham (KP). Terakhir, bila jawaban responden tidak tepat sama sekali ataupun tidak memberikan jawaban, maka dikategorikan ke dalam tidak paham sama sekali (TPSS).

Akhirnya *analisis kedua*, tentang harapan-harapan responden dideskripsikan sesuai dengan pengelompokkan jawaban responden berdasarkan tema-tema yang ingin dijaring. Pada setiap tema ditampilkan kecenderungan jawaban responden. Kecenderungan jawaban tersebut ditampilkan secara deskriptif kuantitatif yaitu melalui prosentase normal.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Kognitif.

Pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali orientasi kognitifnya, baik berupa pengetahuan, pemahaman, dan keyakinannya terhadap kepolitikan pasca Orde Baru dikelompokkan atas tema sebagai berikut: (1) pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan; (2) kekuasaan kepresidenan pasca Orde Baru; (3) sistem peradilan pasca Orde Baru; (4) pelayanan birokrasi; (5) kebijakan pasca Orde Baru; (6) pemahaman terhadap partai politik pasca Orde Baru; (7) pengetahuan tentang pemilu

pasca Orde Baru; dan (8) pengetahuan tentang kebebasan pers pasca Orde Baru.

Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan pada kategori kualitatif sangat paham (SP), agak

paham (AP), kurang paham (KP), dan tidak paham sama sekali (TPSS). Adapun penyebaran jawaban responden secara lengkap dapat dicermati melalui tabel berikut.

Tabel 1 : Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Kognitif.

No.	Orientasi Kognitif Berdasarkan Tema		Kategori Jawaban			
			SP	AP	KP	TPSS
1.	Pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan.	Legislasi	15 (17,24%)	12 (13,80%)	8 (9,19%)	52 (59,77%)
		Anggaran	9 (10,34%)	11 (12,64%)	27 (31,03%)	40 (45,99%)
		Pengawasan	9 (10,34%)	18 (20,69%)	34 (39,08%)	28 (32,18%)
2.	Kekuasaan Kepresidenan pasca Orde Baru.		49 (56,32%)	10 (11,49%)	21 (24,14%)	7 (8,05%)
3.	Sistem peradilan pasca Orde Baru.	Penegakan hukum	12 (13,80%)	57 (65,52%)	9 (10,34%)	9 (10,34%)
		Penyelesaian kasus	23 (26,44%)	47 (54,02%)	10 (11,49%)	7 (8,05%)
4.	Pelayanan birokrasi.		8 (9,19%)	12 (13,80%)	35 (40,23%)	32 (36,78%)
5.	Kebijakan pasca Orde Baru.		15 (17,25%)	10 (11,49%)	10 (11,49%)	52 (59,77%)
6.	Pemahaman terhadap partai politik pasca Orde Baru.	Pengertian	7 (8,05%)	12 (13,80%)	43 (49,43%)	25 (28,72%)
		Peranan	28 (32,18%)	21 (24,14%)	11 (12,64%)	27 (31,04%)
7.	Pemahaman terhadap pemilu.		21 (24,14%)	48 (55,17%)	12 (13,80%)	6 (6,89%)
8.	Pengetahuan tentang kebebasan pers.		9 (10,34%)	6 (6,89%)	45 (51,73%)	27 (31,04%)

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dikatakan bahwa secara umum orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi kognitif masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Namun secara khusus pada tema-tema tertentu seperti kekuasaan kepresidenan pasca Orde Baru, sistem peradilan pasca Orde Baru, dan pemahaman terhadap

pemilu ditanggapi responden dengan sangat paham. Ketiga tema ini termasuk *hot issue* dan mengalami banyak pembenahan pasca Orde Baru, serta secara intens termasuk kategori yang selalu menjadi bahan pemberitaan media massa. Diasumsikan hal tersebut berkontribusi terhadap baiknya orientasi kognitif responden. Dalam konteks kekuasaan kepresidenan terlihat 56,32% ter-

golong sangat paham, 11,49% tergolong agak paham, sementara hanya 8,05% yang tergolong tidak paham sama sekali.

Pencermatan lebih lanjut dari jawaban responden yang sangat paham adalah pada tema sistem peradilan pasca Orde Baru. Temuan penelitian dalam tema penegakan hukum menunjukkan 13,8% responden menjawab dalam kategori sangat paham, 66,52% agak paham, dan hanya 20,68% yang menjawab dalam kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Sementara untuk tema penyelesaian kasus, distribusi jawaban responden sebagai berikut : 26,44% tergolong sangat paham, 54,02% agak paham, 11,49% kurang paham, dan 8,05% tidak paham sama sekali.

Kemudian pada tema pemahaman terhadap pemilu, yang termasuk salah satu *hot issue*, distribusi jawaban responden 24,14% sangat paham, 55,17% agak paham, 13,8% kurang paham, dan hanya 6,89% yang tidak paham sama sekali.

Kecenderungan pemahaman yang sangat positif pada tiga tema diatas ternyata tidak ditemui dalam lima tema lainnya. Bila dicermati lagi tabel 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari aspek kognitif masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Kenyataan ini dapat dideteksi dari jumlah jawaban responden yang terbanyak pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Terutama sekali pada sebagian besar tema-tema yang menyangkut pengetahuan dasar politik, dian-

taranya menyangkut pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan, pelayanan birokrasi, kebijakan pasca Orde Baru, pemahaman terhadap partai politik dan pengetahuan terhadap kebebasan pers pasca Orde Baru.

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dasar politik seperti pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dari lembaga perwakilan terlihat 68,96% responden tergolong kurang paham dan tidak paham sama sekali. Pada fungsi anggaran, persentase kedua katgeori ini mencapai 77,02%. Sementara itu pada fungsi anggaran mencapai 71,26%. Hasil ini menunjukkan superfisialnya pengetahuan dan pemahaman responden terhadap pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan.

Dangkalnya orientasi kognitif responden juga terlihat pada tema pelayanan birokrasi, kebijakan pasca Orde Baru, dan pengetahuan tentang kebebasan pers pasca Orde Baru. Untuk tema pelayanan birokrasi kecenderungan jawaban responden pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali mencapai 77,01%. Untuk tema kebijakan pasca Orde Baru sejumlah 71,26%, sedangkan dalam tema tentang kebebasan pers pasca Orde Baru terdapat persentase yang lebih besar yaitu sejumlah 82,77%.

Namun hal menarik yang dapat dicermati berkaitan dengan tema pemahaman terhadap partai politik. Dalam sub tema ini hanya 8,05% responden yang sangat paham, dan 13,80% agak paham. Selebihnya yaitu sejumlah 78,15% responden berada pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan sub tema

tentang peranan partai politik, dimana terdapat perimbangan kategori jawaban responden. Bila jawaban responden dipilah menjadi dua kelompok memahami dan tidak memahami peranan partai politik, maka proporsinya masing-masing adalah 56,32% dan 43,68%.

Sepanjang data yang diungkapkan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ditinjau dari orientasi kognitif adalah masih rendah atau tidak terlalu dalam. Masih rendah atau tidak terlalu dalamnya hal tersebut terjaring melalui tema-tema yang menyangkut pengetahuan-pengetahuan dasar kepolitikan yang ada dalam sistem politik. Namun beberapa tema yang menyangkut *hot issue* pasca kejatuhan Orde Baru dipahami dengan sangat baik oleh responden. Tema-tema itu adalah kekuasaan kepresidenan, sistem peradilan, dan pemilu pasca Orde Baru. Pemahaman positif terhadap hal ini ditunjang oleh tuntutan agenda reformasi politik yang harus diwujudkan oleh rezim. Kekuasaan kepresidenan pasca Orde Baru terutama presiden terpilih secara langsung dimana kadar legitimasinya sangat ditentukan oleh suara rakyat menjadi perhatian bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) sehingga pemahaman mereka terhadap hal ini menjadi positif. Demikian juga pemahaman positif mereka terhadap sistem peradilan pasca Orde Baru. Terlepas dari keberhasilan suatu rezim, agenda reformasi politik yang dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-

JK) untuk memberantas korupsi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan baik yang menyangkut penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus hukum terutama yang terkait dengan korupsi. Salah satu gebrakan berarti yang dilakukan oleh SBY-JK dalam penegakan hukum adalah memberikan independensi yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani indikasi korupsi atas Aulia Pohan besannya SBY, sehingga pada akhirnya KPK menetapkan besan SBY tersebut sebagai tersangka.

Sementara itu dari segi pengetahuan responden tentang pemilu pasca Orde Baru terungkap jawaban yang positif, dimana 79,81% responden dapat mendeskripsikan perbedaan pemilu pasca Orde Baru dengan masa-masa sebelumnya. Namun bila dilihat secara keseluruhan, ternyata sepuluh tahun reformasi politik yang ditandai dengan era transisi menuju demokratisasi tidak juga memberikan pencerahan politik bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) untuk mengetahui/melek politik politik apalagi terlibat dalam bidang politik itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan salah seorang responden (LW) terungkap hal berikut :

“Sebagai WNI keturunan, saya merasa tidak terlalu tahu tentang politik, berpolitik itu tidak menjadi hobi. Walaupun pemerintahan telah berganti tapi tidak ada pengaruh bagi kami. Kami hanya ingin maju berbisnis di Indonesia dan jangan didiskriminasikan.”

Pernyataan senada sering diungkapkan oleh responden manakala

kita ingin menjangkau jawaban yang lebih mendalam. Ketidaktahuan (kedangkalan) pemahaman tentang kepolitikan pasca Orde Baru membuat mereka menjawab tidak tahu atau tidak paham sama sekali.

Harapan-harapan Perempuan Etnis Cina Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru.

Untuk mengidentifikasi bagaimana harapan-harapan perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Harapan responden terhadap upaya peningkatan partisipasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa).
- b. Harapan responden terhadap pelaksanaan pemilu 2009 yang akan datang.
- c. Harapan responden terhadap pelayanan birokrasi yang diharapkan.

Jawaban atas pertanyaan di atas akan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing tema. Tema pertama berhubungan dengan harapan responden terhadap upaya peningkatan partisipasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terungkap sebagai berikut: 61 (70,11%) dari responden berharap agar pemerintah serius memperhatikan golongan minoritas dan menghilangkan sikap diskriminatif yang mereka rasakan, memberikan perhatian dengan program-program kongkrit seperti pelatihan-pelatihan dan berbagai kegiatan positif lainnya di bidang politik. Sementara jawaban lainnya, 17 (19,54%) responden mengatakan meragukan apakah mereka memiliki harapan dalam bidang politik. Sedangkan 9 (10,35%) lainnya memberikan jawaban

menyimpang dari substansi yang ditanyakan.

Selanjutnya tema yang kedua, yaitu harapan responden terhadap pelaksanaan pemilu 2009 yang akan datang. Dari jawaban responden terungkap harapan mereka adalah 70 (80,46%) berharap agar pemilu berikutnya tetap terlaksana dalam prinsip jujur dan adil serta lebih transparan. Administrasi pemilu juga lebih ditertibkan sehingga semua masyarakat bisa terdata dan dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara 17 (19,54%) lainnya memandang bahwa pemilu yang diselenggarakan sekarang sudah cukup baik.

Kemudian sehubungan dengan pelayanan birokrasi/aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik 81 (93,1%) berharap agar pemerintah tetap berpegang pada peraturan, tidak pilih kasih dalam melayani. Sementara sisanya 6,9% memandang pelayanan birokrasi pasca Orde Baru sudah mulai baik. Menarik mencermati pendapat salah seorang responden (Y) :

“Bagi kami yang paling penting adalah pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Jangan hanya obral janji, tidak ada bukti nyatanya. Pelayanan juga harus optimal. Pada waktu pilkada kemarin, kami tidak didata dan juga tidak diberi kartu pemilih. Banyak WNI keturunan dekat sini tidak bisa menggunakan hak pilihnya.”

Dari keseluruhan harapan-harapan yang terungkap terlihat adanya perasaan teralienasi dalam kehidupan politik, baik dalam hal orientasi, sikap, maupun harapan yang mereka

inginkan. *Triple discrimination* yang dialami perempuan etnis Cina (Tionghoa) diharapkan segera hilang dengan berubahnya format politik. Setidaknya kita berharap orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru akan lebih baik. Namun kenyataannya perubahan format politik tidak otomatis membangkitkan motivasi mereka untuk memahami politik apalagi terjun ke dalam kehidupan politik praktis, sebagaimana yang diungkapkan oleh LE, salah seorang Pengurus Wanita Himpunan Bersatu teguh (WHBT) untuk wilayah Sumbar-Riau :

“Kalau dilihat secara umum, perempuan etnis Cina tidak tertarik dengan politik. Selain tidak punya minat, waktu juga tidak ada karena mereka disibukkan dengan urusan rumah tangga, karir, dan pekerjaan (dagang). Kamipun di WHBT ini hanya bergerak di bidang sosial, terutama membantu anggota dalam memajukan kebudayaan serta urusan-urusan keagamaan. Sementara di bidang politik secara khusus tidak terprogram.”

Jika ditelaah lebih lanjut upaya pencerahan hak-hak keturunan etnis Cina (Tionghoa) telah dilakukan sejak dikeluarkannya Keppres No.6 tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden yang mencabut Inpres No.14 tahun 1967 tentang pelarangan untuk merayakan upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Cina (Tionghoa) secara terbuka. Dua tahun berikutnya Megawati selaku presiden saat itu mengeluarkan Keppres No.191 tahun 2002 yang menetapkan Tahun

Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal yang lebih menggembirakan lagi bagi etnis Cina (Tionghoa) adalah dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan mengakhiri diskriminasi etnis sejak 11 Juli 2006.

Momentum-momentum tersebut selayaknya dapat menjadi *entry point* bagi etnis Cina (Tionghoa) pada umumnya dan perempuan etnis Cina (Tionghoa) pada khususnya untuk berkiprah di berbagai bidang khususnya bidang politik yang selama ini telah teralienasi dari kehidupan mereka. Perasaan teralienasi atau terdiskriminasi menurut Theodorson & Theodorson (1979) adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi mencakup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan dibuat secara alamiah dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (merit).

Diskriminasi yang telah lama dilakukan membuat sebagian besar perempuan etnis Cina (Tionghoa) sebetulnya tidak begitu peduli dengan keadaan politik, mereka dapat dikatakan tidak memihak atau berkiblat ke politik manapun. Mereka lebih cenderung untuk memilih hidup tenteram lahir bathin dengan menjauhkan diri dari hiruk pikuk politik. Untuk itu, agar perempuan etnis Cina (Tionghoa) dapat berkontribusi dalam bidang politik, pemerintah harus mengeluarkan suatu program khusus yang berfungsi sebagai *special threatment* agar mereka dapat diberdayakan.

V. PENUTUP

Kesimpulan.

Dari paparan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Orientasi politik perempuan etnis Cina (Tionghoa) ditinjau dari orientasi kognitif masih superfisial atau masih jauh dari yang diharapkan. Hanya dalam tiga tema berikut, yaitu tentang kekuasaan kepresidenan, sistem peradilan, dan pemahaman terhadap pemilu yang dapat dijawab dengan baik. Sedangkan hal-hal mendasar tentang pengetahuan politik kenegaraan dapat dikatakan kurang dipahami.
- 2) Harapan perempuan etnis Cina (Tionghoa) terhadap kepolitikan pasca Orde Baru adalah kiranya pemerintah dapat melakukan pencerahan/ pemberdayaan politik secara terprogram agar mereka

tidak lagi mengalami *triple discrimination*.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah hendaknya membuat program khusus (*special threatement*) bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta keterampilan politik yang mereka miliki.
- 2) Pusat studi wanita serta berbagai institusi lainnya yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan perempuan seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten hendaknya melakukan sosialisasi tentang hak-hak politik perempuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Affan Gafar. 1992. *The Javanese Voters: A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____. 1996. *Sebuah Catatan Untuk Wanita Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis UGM di Yogyakarta, 12 Desember 1996.
- Almond, Gabriel dan G.B. Powell Jr. 1978. *Comparative Politics: A Development Approach*. New Delhi : Oxford and IBH Publishing Co.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta : Bina Aksara.
- Freedman, Amy L. 2000. *Political Participation and Ethnic Minorities : Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and United States*. London: Routledge.
- Hendrik, Doni. 2003. "Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu 1999 di Kota Padang". *Skripsi-FISIP Universitas Andalas*.

- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews (ed.). 1989. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ratnawati. 1993. *Sikap Perilaku dan Sistem Politik*. Laporan Penelitian UGM Yogyakarta
- Saputra, Dianthus. 2001. "Marginalisasi Perempuan Cina (Tionghoa) di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan No.17*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Uhlen, 1997. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Rofik Suhud. Bandung: Mizan.

